



Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara terhadap Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Efektivitas Penyerapan Anggaran di Wilayah Kerja KPPN Garut

Mulyanto, Mulyaningsih

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan mekanisme pengeluaran negara terhadap manajemen anggaran satuan kerja kementerian/ lembaga dalam mewujudkan efektivitas penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Garut. Metode yang digunakan analisis deskriptif dengan teknik survey. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen anggaran dan efektivitas penyerapan anggaran. Pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen anggaran. Pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara berpengaruh secara nyata dan positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Manajemen Anggaran berpengaruh secara nyata dan positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Garut.

Kata Kunci : Pengeluaran, Analisis Deskriptif, Anggaran

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki pemerintahan yang semakin baik dari tahun ketahun baik pemerintahan pusat, daerah dan plosok desa sekalipun. Dalam menjalankan roda pemerintahannya tentunya pemerintah harus memperhatikan segala aspek yang mempengaruhi kesejahteraan orang banyak atau masyarakat (Mafzatun et al., 2017). Pengelolaan keuangan merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara, khususnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka harus ada perubahan dalam pengelolaan keuangan (Salwah, 2019).

Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pemerintah memerlukan biaya dengan cara memungut berbagai jenis pendapatan dari masyarakat, kemudian membelanjakannya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Margaretha Lansi Rhussary, 2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai hal yang paling utama dalam keuangan negara merupakan perwujudan pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia serta sebagai roda penggerak pembangunan perekonomian negara indonesia (Nyoman et al., 2018).

Dalam fase implementasi APBN, APBN diturunkan menjadi rencana kerja program kementerian dan lembaga negara. Pada fase ini dokumen APBN diterjemahkan menjadi dokumen Daftar Isian Implementasi Anggaran (DIPA) satuan kerja kementerian/lembaga. Implementasi DIPA merupakan proses pengelolaan anggaran oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam

melakukan penyerapan anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan perkantoran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk pendistribusian dana program pemerintah. Dalam fase ini pemerintah dihadapkan pada persoalan penyerapan anggaran yang rendah (Suparmoko, 2002). Pengelolaan anggaran merupakan kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan anggaran dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja negara oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam membiayai penyelenggaraan perkantoran, pengadaan barang/jasa dan pendistribusian dana program pemerintah sesuai jadwal yang telah direncanakan dalam Halaman III DIPA. Pengelolaan dikatakan baik jika pengeluaran yang melebihi penerimaan artinya kebutuhan uang kas pemerintah relatif tinggi (Sumantri, 2017).

Lambatnya penyerapan anggaran telah menjadi masalah yang selalu berulang dan *massive* terjadi setiap tahun. Sehingga berdampak pada lambatnya realisasi implementasi program-program kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Lambatnya penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga dapat dilihat dari terjadinya penumpukan permintaan pencairan dana anggaran pada akhir tahun. Hal ini dikarenakan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga tidak melakukan pencairan dana DIPA sesuai periodisasi penarikan dana per bulan dan berusaha mengejar realisasi DIPA yang terlambat di awal dan pertengahan tahun untuk dilakukan pencairan dana pada akhir tahun. Penumpukan permintaan pencairan dana anggaran pada akhir tahun tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kesalahan pencairan dana dan pembebanan belanja negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara dalam bentuk finansial maupun non finansial. Hal ini tentunya harus ada kebijakan yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan seperti menurut Pelaksanaan Kebijakan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan anggaran Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan (Hermawan, 2013).

Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa pejabat pengelola anggaran, penulis menduga bahwa penyerapan anggaran belum dilakukan secara optimal, diantaranya diindikasikan oleh terjadinya tidak tercapainya target penyerapan anggaran tiap triwulan dan penumpukan permintaan pencairan dana anggaran pada akhir tahun, Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan dalam penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga diantaranya adalah perencanaan yang kurang matang oleh pejabat pengelola anggaran.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara terhadap Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Efektivitas Penyerapan Anggaran di Wilayah Kerja KPPN Garut”.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analitik dengan teknik survey. Metode penelitian deskripsi analitik merupakan metode untuk memberikan gambaran dengan tujuan menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara lain dari dua variabel berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mencari variabel penyebabnya. Metode deskripsi analitik yaitu suatu teknik penelitian untuk menguji hasil dan dampak dari suatu kegiatan atau tindakan terhadap objek atau lingkungannya.

Untuk melihat kondisi objektif ada objek penelitian. Peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjaring dan

mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

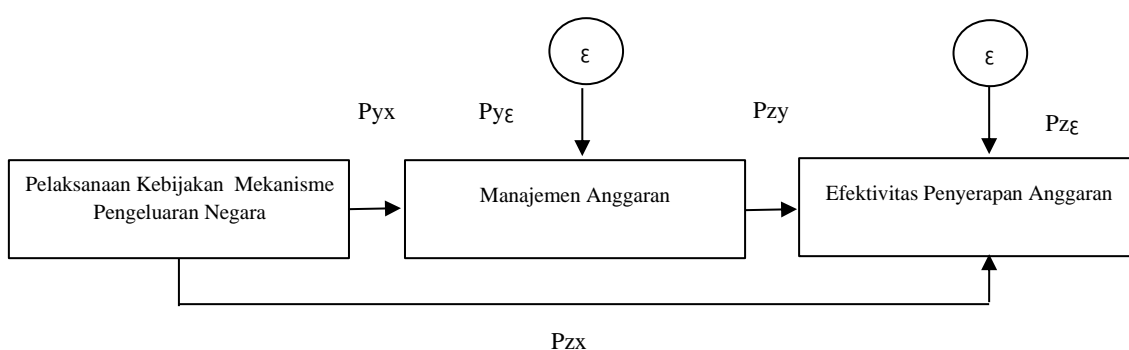
Tabel 1 Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian

No	Variabel penelitian	Dimensi
1	Pelaksanaan Kebijakan Pengeluaran Negara (Edward III, 1980)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Kecenderungan-kecendrungan 4. Struktur birokrasi
2	Manajemen Anggaran (Terry, 2009)	1. Perencanaan Pengelolaan Anggaran 2. Pengorganisasian Pengelolaan Anggaran 3. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 4. Pengendalian Pengelolaan Anggaran
3	Efektivitas Penyerapan Anggaran (Hidayat, 1986)	1. Kuantitas Penyerapan Anggaran 2. Kualitas Penyerapan Anggaran 3. Waktu Penyerapan Anggaran

Responden penelitian adalah Aparat Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan secara fungsional pada tugas pengelola dana DIPA Satuan Kerja Kementerian/Lembaga meliputi jabatan PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran di masing-masing kantor Satuan Kerja Kementerian/Lembaga penerima DIPA pada tahun 2017 dalam wilayah pembayaran KPPN Garut. Populasi pada penelitian ini berjumlah 113 orang.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada Gambar:



Tabel 2 Hasil Perhitungan

Hipotesis Utama	Koefisien jalur	F _{hitung}	F _{tabel}	Determinan	Makna hubungan
Pengaruh pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara(X) terhadap manajemen anggaran (Y) dalam mewujudkan efektivitas penyerapan anggaran (Z)	0,812	70,57	3,07	0,660	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Determinan	Makna hubungan
Pengaruh pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara(X) terhadap manajemen anggaran(Y)	0,927	26,09	1,98	0,859	Signifikan
Pengaruh pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara(X) terhadap efektivitas penyerapan anggaran(Z)	0,378	2,53	1,98	0,143	Signifikan
Pengaruh manajemen anggaran(Y) terhadap efektivitas penyerapan anggaran(Z)	0,80	4,82	1,98	0,359	Signifikan

Pengujian Hipotesis Utama

Besarnya pengaruh Pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap manajemen anggaran dalam mewujudkan efektivitas penyerapan anggaran dilihat dari koefisien determinasi (R^2_{YZX}) sebesar 66% sedangkan sisanya 34% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara (X) terhadap manajemen anggaran (Y) dalam mewujudkan efektivitas penyerapan anggaran (Z) sebesar 66%

Besarnya pengaruh tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan tanggapan responden terhadap dimensi-dimensi dalam variabel pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara secara keseluruhan yang mencapai 87,71%. Hal ini didukung oleh tanggapan responden terhadap dimensi komunikasi sebesar 87,17% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya besarnya pengaruh tersebut juga didukung oleh tanggapan responden terhadap dimensi sumber daya sebesar 88,83% dan dimensi kecenderungan-kecenderungan sebesar 86,90% dikategorikan sangat baik. Demikian pula halnya dengan faktor pendukung lain yaitu struktur birokrasi dimana tanggapan responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 87,26% dengan kategori sangat baik.

Keempat faktor pelaksanaan kebijakan di atas menegaskan juga keterkaitannya dengan manajemen anggaran yang meliputi Dimensi Perencanaan, Dimensi Pengorganisasian, Dimensi Pelaksanaan, dan Dimensi Pengendalian. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap indikator-indikator kinerja pegawai yang secara keseluruhan mencapai rata-rata 87,05% dengan kategori sangat baik. Variabel Manajemen Anggaran yang menunjukkan indikator tertinggi didukung oleh tanggapan responden pada dimensi perencanaan yang masing-masing memiliki rata-rata 86,48% dengan kategori sangat baik, pengorganisasi yang memiliki rata-rata 86,68% dengan kategori sangat baik, pelaksanaan, yang memiliki rata-rata 86,87% dengan kategori sangat baik dan pengendalian yang memiliki rata-rata 88,39% dengan kategori sangat baik.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara dituntut manajemen anggaran yang baik sehingga efektivitas penyerapan anggaran dapat dicapai. Artinya, manajemen anggaran harus benar-benar dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran oleh pejabat pengelola anggaran sehingga tercapai efektivitas penyerapan anggaran. Efektivitas penyerapan anggaran dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap dimensi-dimensi dalam variabel efektivitas penyerapan anggaran yang secara keseluruhan mencapai 84,51% dengan kategori sangat baik. Besarnya tanggapan responden ini didukung oleh tanggapan responden terhadap dimensi kuantitas Penyerapan Anggaran yang mencapai rata-rata sebesar 84,78% dengan kategori sangat baik, Kualitas Penyerapan Anggaran yang mencapai rata-rata sebesar 84,56% dengan kategori sangat baik dan waktu penyerapan anggaran yang mencapai rata-rata sebesar 84,34% dengan kategori sangat baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara berpengaruh terhadap manajemen anggaran dalam mewujudkan efektivitas penyerapan anggaran. Artinya pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh manajemen anggaran yang baik sehingga efektivitas penyerapan anggaran mencapai tingkat yang optimal. Sebagaimana menurut Islamy dalam Iskandar(2017:337) yang mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijaksanaan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Selain faktor pelaksanaan kebijakan dan manajemen anggaran, variabel efektivitas penyerapan anggaran juga dipengaruhi faktor lain (*epsilon*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor lain yang tidak diteliti sebesar 33,99%. *Epsilon* yang diduga turut mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran adalah proses pengadaan barang/jasa dan revisi DIPA.

Hasil pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara (X) terhadap Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Y) diperoleh nilai koefisien jalur (P_{YX}) adalah sebesar 0,9273 (sesuai matrik korelasi R).

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh implementasi kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap manajemen anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar = 26,09 Sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98. Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ 26,09 > 1,98 maka H_0 ditolak, artinya pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara (X) berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Y).

Selanjutnya dilakukan perhitungan besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap manajemen anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga melalui persamaan yang diketahui dari Matriks Korelasi. Besarnya pengaruh variable X terhadap Y adalah $R^2_{YX} = 0.9273^2 = 0.8599$

Sehingga besarnya pengaruh epsilon :

$$P_{Y\epsilon}^2 = 1 - 0,8599$$

$$P_{Y\epsilon}^2 = 0,1401$$

Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara memiliki pengaruh positif terhadap manajemen anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Namun didalam pelaksanaannya implementasi kebijakan mekanisme pengeluaran negara tidak serta merta mempengaruhi manajemen anggaran. Hasil penelitian ini sesuai dengan observasi di lapangan yang menunjukkan kondisi tersebut bahwa meskipun implementasi kebijakan mekanisme pengeluaran negara sudah baik, namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk menjamin terwujudnya manajemen anggaran yang optimal. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi manajemen anggaran yang merupakan variabel epsilon yang diduga mempengaruhi manajemen anggaran, diantaranya budaya kerja, kinerja pegawai dan lingkungan birokrasi.

Hasil pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Y) terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran (Z). Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{ZY}) adalah sebesar 0,8001 (sesuai matrik korelasi R).

Untuk mengetahui pengaruh manajemen anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Y) terhadap efektivitas penyerapan anggaran (Z) maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar = 4,82 Sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98. Dengan demikian, karena $t_{hitung} 4,82 > t_{tabel} 1,98$ maka H_0 ditolak, artinya pelaksanaan Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Y) berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran (Z). Perhitungan besarnya pengaruh Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Y) terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran (Z) melalui persamaan :

Diketahui bahwa : $r_{zy} = 0,8001$ dan $P_{zy} = 0,4493$ maka :

$$r_{zy} \cdot P_{zy} = 0,8001 \times 0,4493 = 0,3595$$

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen anggaran memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran sebesar 35,95% dan rendahnya pengaruh ini menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh manajemen anggaran semata. Hasil pengujian ini sesuai dengan observasi di lapangan yang menunjukkan kondisi faktual bahwa meskipun manajemen anggaran sudah optimal, namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk menjamin terwujudnya efektivitas penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya faktor manajemen anggaran yang mempengaruhi terhadap peningkatan penyerapan anggaran yang merupakan variabel epsilon sebesar 64,05% yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya lingkungan kerja dan kinerja pegawai.

Hasil pengujian Sub Hipotesis Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran (X) Negara terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran (Z). Berdasarkan pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{ZX}) adalah sebesar 0,3782. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh pelaksanaan kebijakan pengeluaran negara (X) terhadap efektivitas penyerapan anggaran (Z) maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar = 2,53 Sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98. Dengan demikian, karena $t_{hitung} 2,53 > t_{tabel} 1,98$ maka

H_0 ditolak, artinya pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Perhitungan besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap efektivitas penyerapan anggaran melalui tahapan persamaan sebagai berikut:

Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z :

Diketahui bahwa $r_{zx} = 0,3782$ maka :

$$r_{zx} \cdot r_{zx} = 0,3782 \times 0,3782 = 0,1431$$

Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z :

$$(P_{ZY})(r_{YZ})(P_{ZX}) = 0,4493 \times 0,9273 \times 0,3782 = 0,1576$$

Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z :

$$(r_{ZY})^2 + (P_{ZY})(r_{YZ})(P_{ZX}) = 0,1431 + 0,1576 = 0,3007$$

Besarnya pengaruh secara langsung pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap efektivitas penyerapan anggaran adalah sebesar 14,31%. Pengaruh pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap efektivitas penyerapan anggaran melalui manajemen anggaran adalah sebesar 15,76%. Sehingga jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran sebesar 30,07% sedangkan sisanya sebesar 69,93% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel variabel Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara yang tidak dimasukkan kedalam model.

Hasil pengujian ini sesuai dengan observasi di lapangan yang menunjukkan kondisi faktual bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara sudah dilakukan secara baik, namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk menjamin terwujudnya efektivitas penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan penyerapan anggaran yang merupakan variabel epsilon yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah dan revisi DIPA.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu Pertama, variabel Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara menunjukkan kriteria sangat baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi sumber daya yaitu sarana dan prasarana. Persentase terendah terdapat pada dimensi komunikasi dengan indikator yaitu konsistensi kebijakan.

Kedua, variabel Manajemen Anggaran menunjukkan kriteria sangat baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi pengendalian yaitu monitoring implementasi pengelolaan anggaran. Sedangkan indikator persentase terendah terdapat pada dimensi perencanaan pengelolaan anggaran yaitu pembahasan dan perumusan masalah. Ketiga, variabel Efektivitas Penyerapan Anggaran menunjukkan kriteria sangat baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi target kualitas yaitu pencapaian output anggaran sesuai rencana. Sedangkan indikator

dengan nilai persentase terendah pada dimensi target waktu yaitu pencapaian tingkat penyerapan anggaran.

Pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan bahwa semua variabel memberikan pengaruh nyata dan positif. Dari semua hipotesis yang diajukan, hasilnya menunjukkan bahwa semua hipotesis nihil ditolak dan hipotesis kerja diterima.

Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang, berkaitan dengan beberapa temuan permasalahan penelitian serta adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada masa yang akan datang dapat melakukan penelitian lebih lanjut selain dari variabel-variabel penelitian ini. Variabel penelitian lanjutan yang disarankan antara lain tentang kinerja pejabat pengelola anggaran, dan faktor resiko pengelolaan anggaran dalam pengambilan keputusan melalui penelitian yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Amaral, J., & Wiagustini, L. P. (2019). Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministério Das Obras Públicas Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 95. <https://doi.org/10.24843/Eeb.2019.V08.I02.P01>
- Anugerahani, Dian, I. W., & Imam, S. (2013). Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu Manajemen, Revitalisasi*, 2(2), 147–162.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hidayat. (1986). *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press.
- Kiwang, A. S., & Dkk. (2015). Kebijakan Dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (Jkap)*, 19(1), 71–81.
- Mafzatun, C., Rahman, B., & Andirfa, M. (2017). Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(November), 34–45.
- Margaretha Lansi Rhussary. (2017). Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. *Cendekia : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 52–65.
- Murdani, M., & Suherlan, A. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Apbd Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 127–148. <https://doi.org/10.15408/Sigf.V3i2.2057>
- Musnawati, Yesi Mutia Basri, & Nasrizal. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Ngangangor, R. P. U., Posumah, J. H., & T. Sondakh. (2014). Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(4).
- Nyoman, N., Ayu, S., Bagia, I. W., Putu, G., & Susila, A. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Rahayu, S., Ludigdo, U., & Affandy, D. (2007). Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di

- Provinsi Jambi. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26–28.
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 09(November 2019), 164–182.
- Sumantri, J. (2017). Studi Pendahuluan Pengaruh Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Terhadap Imbal Hasil Mismatch Treasury Bills. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1, 52–64.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Andi.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Yusup Hermawan. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–5.